EVALUASI KINERJA MANAJEMEN DAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2020 - 2022

Riza Nur Madaniyah[1], Suprapti Widiasih[2]
[1]Universitas Hang Tuah, [2]Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Correspondence email: suprapti126@gmail.com

Histori Artikel

Submitted
13 September 2024
Reviewed
20 September 2024
Accepted
29 September 2024
Published
30 September 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 - 2022 sehingga Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah serta dapat segera melakukan tindakan prefentiv jika mengalami krisinis ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi pada Laporan Keuangan Pemerinta Kota Surabaya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 - 2022. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis rasio keuangan seperti: rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja Kota Surabaya pada tahun 2020 - 2022. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020 – 2022 jika dilihat dari rata-rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 86,05% dengan kategori tidak efektif, rata-rata rasio kemandirian sebesar 152,37% dan berada pada skategori delegatif yang artinya Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat, rata-rata rasio Desentralisasi Fiskal sebesar 58,03% dengan kategori sangat baik Dan rasio Belanja Operasi sebesar 82,68% sedangkan rasio belanja modalnya sebesar 20,97%.

Kata kunci*: Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan, Kinerja Manajemen, Kota Surabaya*

ABSTRACT

This research aims to provide an overview the financial performance of the City of Surabaya for the 2020 - 2022 budget year, so that the Surabaya City is expected to be able to increase and maximize local revenue and be able to immediately take preventative action if it experiences an economic crisis. This research uses quantitative descriptive methods. The data collection technique used was observation of the Surabaya City Regional Government Financial Report. The data used in this research is secondary data sourced from the Surabaya City Government Budget Realization Report for 2020 - 2022. The analytical technique used in this research is financial ratio analysis such as: the ratio of the effectiveness of regional original income, the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, and the ratio of spending harmony. Based on the results of data processing and discussion, it shows that the financial performance of the Surabaya City Government for the 2020 - 2022 budget year when viewed from the Effectiveness Ratio of Local Own Revenue is 86.05% with the category ineffective, Then from the average of independence ratio is 152.37% and is in the delegative category, which means that the Surabaya City Government is not dependent on central government assistance funds, the average of Fiscal Decentralization ratio is 58.03%, which is in the very good category and the average Operational Expenditure Ratio was 82.68% while the Capital Expenditure Ratio was 20.97%.

Keywords*: Financial Ratio, Financial Performance, Managerial Performanece, City of Surabaya*

PENDAHULUAN

Pada saat ini Otonomi Daerah di Indonesia mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 34 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Otonomi daerah bertujuan untuk pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya serta mengelola tata kelola pemerintah sendiri dengan baik, menggali potensi daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat atau provinsi sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan daerah berperan penting pada kemajuan daerah, sehingga untuk menilai keberhasilan organisasi publik perlu dilakukan pengukuran kinerja. Kinerja keuangan adalah indikator untuk mengetahui sehat tidaknya suatu organisasi. Sehingga kinerja keuangan sangat penting diukur untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan organisasi dengan menganalisis laporan keuangan organisasi.

Ditinjau dari segi aspek teori keagenan, yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah, dengan prinsipalnya adalah rakyat yang diwakili oleh DPRD (Halim & Kusufi, 2014). Sebagai agen, Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawab keuangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Laporan keuangan menjadi dasar dalam penilaian kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan pencapaian tujuan kegiatan keuangan pemerintah daerah dan diukur dengan indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Sijabat et al., 2014). Menilai kinerja pemerintah melalui pelaporan keuanga dapat memberikan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada publik.

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangannya degnan baik dan akurat (Aisyah, 2019). Kinerja keuangan juga menjadi aspek penting untuk dipelajari pada suatu organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Setelah diberlakukannya penganggaran berbasis kinerja, seluruh pemerintah dituntut untuk mencapai kinerja keuangan yang baik dengan memperhatikan ekonomis, efektivitas dan efisiensi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian penting dalam pemerintah daerah dalam melaksanakan pembiayaan dan pelaksanaan berbagai proyek dan program yang telah direncanakan pemerintah daerah. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daeran, dan pembiayaan daerah. Kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya anggaran yang efektif dan efisien membutuhkan informasi akuntansi sebagai dasar penting dalam mengambil keputusan (Priono, 2003). Pengelolaan keuangan dan anggaran daerah adalah aspek penting yang harus diperhatikan secara serius bagi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat berdampak terhadap kemajuan suatu daerah.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memperbaiki kinerja pemerintah dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya (Ariadi & Jatmika, 2021). Selain itu dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya. Kinerja meruapakan pencapaian dari apa yang telah direncanakan baik secara pribadi, kelompok atau organisasi (Priono et al., 2019). Suatu kinerja dinilai baik jika pencapaiannya sesuai dengan yang direncanakan. Saat ini, penggunaan analisis rasio laporan keuangan telah dijadikan sebagai alat untuk melakukan analisis kinerja. Dengan melakukan analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah, maka dapat diketahui kinerja pemerintah daerah sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pendapatan daerah (Sari et al., 2021).

Akuntansi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuat laporan keuangan (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021). Laporan keuangan bersifat *general purposive*, dengan kata lain, laporan keuangan dibuat sederhana dan umum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak. Namun banyak pemangku kepentingan yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Permasalahan ketidakmampuan memahami laporan keuangan dapat diatasi dengan menanalisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan ukuran untuk mengidentifikasi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, dimana dalam pengelolaan anggarannya selalu memperhatikan keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 61.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan 61.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei

2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (BPK, 2023).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media yang digunakan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya pada publik (Kartoprawiro & Susanto, 2018). Laporan keuangan pemerintah daerah diaudit setiap tahunnya dan dievaluasi dalam bentuk laporan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Laporan keuangan pemerintah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Pengelolaan APBD Kota Surabaya diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang APBD. Regulasi ini mengatur tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1 Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja Kota Surabaya 2020 - 2022

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Realisasi Total Belanja	Keterangan
2020	Rp. 7.545.416.994.176	Rp. 8.032.680.988.065	Defisit
2021	Rp. 8.326.878.076.226	Rp. 7.819.077.321.546	Surplus
2022	Rp. 8.791.308.678.482	Rp. 9.448.236.778.684	Defisit

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2022 telah terjadi defisit, dimana dana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerahnya. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian Siswo terhadap kinerja keuangan Kota Surabaya periode 2015 sampai dengan tahun 2019 hanya menggunakan tiga rasio keuangan sebagai variabel penelitian dan tidak dapat menjelaskan secara spesifik perbedaan hasil kinerja keuangan tiap periode (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021). Oleh sebab itu, peneliti ingin mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan empat rasio keuangan dalam 3 periode laporan. Rasio keuangan tersebut adalah rasio efektivitas daerah, rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja.

Rasio efektivitas daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan semula dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Halim, 2012). Rasio Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendaptan yang diperlukan daerah (Halim, 2012). Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, Mahmudi mengemukakan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi sumber anggarannya untuk belanja pembangunan (langsung) dan belanja rutin (tidak langsung) secara optimal (Widodo, 2001).

Penelitian oleh Handayani menggunakan analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012 hingga 2015 tidak dapat memberikan informasi apakah kinerja keuangan sudah baik pada periode tersebut (Karlina & Handayani, 2017). Indikator yang digunakan dalah rasio desentralisasi, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan pendapatan. Evaluasi terhadap kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya belum diketahui dan belum jelas pula, apakah pengelolaan anggaran daerah Kota Surabaya sudah baik. Oleh sebab itu, penelitian ini menambahkan rasio belanja daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Dari berbagai hasil penelitian di atas, peneliti akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2022.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang secara objektif mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya diukur kinerja keuangannya. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan melakukan pengamatan dan analisis terhadap laporan keuangan yaitu berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi berupa laporan anggaran atau realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 – 2022. Data tersebut diperoleh dari website resmi Pemerintah Kota Surabaya.

Fokus penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan dengan mengukur rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja. Analisi ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya yang mencakup pendapatan serta belanja daerah dalam periode 3 tahun yaitu 2020-2022.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh guna menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis ini digunakan untuk menilai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2020-2022 dengan mengacu pada Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya. Kemampuan daerah dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah serta membiayai pengeluaran rutin daerah,

Tahapan penelitian deskriptif kuantitatif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya periode 2020 – 2022. Data tersebut diperoleh dari website resmi pemerintah Kota Surabaya.
2. Melakukan perhitungan rasio efektivitas daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah, dan rasio keserasian belanja dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya periode 2020 – 2022.
3. Mendeskripsikan hasil perhitungan rasio efektivitas daerah, rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja.
4. Melakukan analisis indikator pengukuran kinerja keuangan menggunakan Rasio Efektivitas Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja.
   - Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah: menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan yang telah ditargetkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Anggaran\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas (Mahsun, 2013) sebagai berikut :

Tabel 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Kurang dari 100%	Tidak efektif
Sama dengan 100%	Efektif Berimbang
Lebih dari 100%	Efektif

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD): menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya sendiri. Rumus yang digunakan adalah:

$$RKKD = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer\ Pusat/Provinsi}\ x\ 100\%$$

Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016) sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Kemandirian Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Kriteria Efektivitas
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif: Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dalam arti lain, daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah
Rendah	25 - 50%	Konsulatif: Campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
Sedang	50 – 75%	Partisipatif: Peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
Tinggi	75 – 100%	Delegatif: Campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah

- Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

  Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini merupakan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Rumus yang digunakan adalah:

$$Derajat\ Desentralisasi\ Fiskal = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\%$$

Kriteria derajat desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2016) sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Pola Hubungan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,00 – 20,00	Kurang
20,00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Baik
Diatas 50,00	Sangat Baik

- Rasio Keserasian Belanja: Rasio yang mempertimbangkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dananya. Ada dua perhitungan rasio ini yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.
  a. Rasio Belanja Operasi: perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan terkait porsi belanja daerah yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu yang sifatnya rutin dan berulang (Mahmudi, 2016). Rumus yang digunakan adalah :

$$Rasio\ Belanja\ Operasi = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah}\ x\ 100\%$$

  b. Rasio Belanja Modal: perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2016). Rumus yang digunakan adalah:

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah}\ x\ 100\%$$

5. Menyimpulkan hasil penelitian

HASIL

Hasil rekapitulasi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5 Rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kota Surabaya 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah
2020	4.289.960.292.372,98	7.545.416.994.175,97	2.725.829.859.924	6.439.039.886.246,0	8.032.680.988.065,47
2021	4.727.280.629.669,69	8.326.878.076.226,29	3.218.925.114.659	6.771.433.976.328,2	7.819.077.321.545,57
2022	5.314.695.257.794,40	8.791.308.679.482,20	3.476.613.421.687,80	7.679.441.144.733,5	9.448.236.778.683,50

Sumber: Data diolah (2024)

Berikut merupakan hasil dari pengukuran kinerja Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Target/Anggaran PAD	Persentase	Kriteria Rasio
2020	4.289.960.292.372,98	5.035.094.239.075	85,20 %	Tidak Efektif
2021	4.727.280.629.669,69	5.322.810.142.550	88,81 %	Tidak Efektif
2022	5.314.695.257.794,40	6.316.345.973.654	84,14 %	Tidak Efektif
Rata-rata 3 periode			86,05%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah di atas, diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola realisasi pendapatan asli daerah pada 3 periode berada pada kategori tidak efektif atau tidak optimal dalam mengelola realisasi pendapatan Kota Surabaya.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Persentase	Kriteria Rasio
2020	4.289.960.292.372,98	2.725.829.859.924	157,38 %	Delegatif
2021	4.727.280.629.669,69	3.218.925.114.659	146,85 %	Delegatif
2022	5.314.695.257.794,40	3.476.613.421.687,80	152,87 %	Delegatif
Rata-rata 3 periode			152,37%	Delegatif

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian daerah di atas, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya termasuk dalam kategori delegatif pada ketiga periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga menghilangkan campur tangan pemerintah pusat/provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial masyarakat dinilai sangat tinggi.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 8 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria Rasio
2020	4.289.960.292.372,98	7.545.416.994.175,97	56,86 %	Sangat Baik
2021	4.727.280.629.669,69	8.326.878.076.226,29	56,77 %	Sangat Baik

2022	5.314.695.257.794,40	8.791.308.679.482,20	60,45 %	Sangat Baik
Rata-rata 3 periode			58,03%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal di atas, terlihat bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Surabaya berada pada kategori sangat baik pada ketiga periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dikatakan sangat baik dalam memobilisasi pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Surabaya selama 3 periode.

4. Rasio Keserasian Belanja
   - Rasio Belanja Operasi

Tabel 9 Rasio Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase
2020	6.439.039.886.246,0	8.032.680.988.065,47	80,16 %
2021	6.771.433.976.328,2	7.819.077.321.545,57	86,60 %
2022	7.679.441.144.733,5	9.448.236.778.683,50	81,28 %
Rata-rata 3 periode			82,68%

Sumber: Data diolah (2024)

- Rasio Belanja Modal

Tabel 10 Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase
2020	1.583.663.159.605	8.032.680.988.065,47	19,72 %
2021	1.916.336.503.390	7.819.077.321.545,57	24,51%
2022	1.766.030.466.528	9.448.236.778.683,50	18,70%
Rata-rata 3 periode			20,97%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian belanja daerah pada dua tabel di atas, terlihat bahwa pada 3 periode menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan rasio belanja operasi terlihat lebih besar dengan rata-rata 82,68% sedangkan rata-rata belanja operasi sebesar 20,97%.

DISKUSI

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2020 hingga 2022 belum bisa dikatakan baik karena rasio efektivitas PAD berada pada posisi tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya masih belum mampu menstabilkan realisasi pendapatan daerah dengan realisasi dana belanja daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya, pada periode 2020 dan 2022, alokasi dana untuk belanja daerah melebihi total dana pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2021, pengeluaran belanja daerah dibawah pendapatan daerah.

Ringkasan hasil pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Ringkasan Analisis Rasio Kinerja Keuangan Kota Surabaya 2020-2022

No	Analisis Kinerja Keuangan	Rata-rata hasil rasio	Keterangan
1	Rasio Efektivitas PAD	86,05 %	Tidak Efektif
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	152,37 %	Delegatif
3	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	58,03 %	Sangat Baik
4	Rasio Keserasian Belanja Daerah		
	a. Belanja Operasi	82,68%	Tinggi

	b. Belanja Modal	20,97%	Rendah

1. Tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Surabaya meningkat pada tahun 2021 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2022. Rata-rata ketiga periode tersebut masuk masuk dalam kategori tidak efetif. Penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian oleh Muarif yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017" dengan hasil rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 secara rata-rata berada pada kategori tidak efektif (Muarif, 2019). Sementara itu, hasil penelitian ini menunjukkan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2020-2022 berada pada kategori tidak efektif.
2. Tingkat kemandirian keuangan Daerah Kota Surabaya pada 3 periode tahun 2020-2022 berada pada posisisi delegatif, tidak ada campur tangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian milik Amal dan Wibowo yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi covid-19, dimana rasio kemandirian keuangan daerah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori delegatif (Amal & Wibowo, 2022). Berbeda dengan hasil penelitian milik Marliani yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016-2020, dimana hasil rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori instruktif atau sangat bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat (Marliani, 2022).
3. Tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 rata-rata berada pada kategori sangat baik. Hasil rasio derajat desentralisasi fiskal berkaitan dengan teori agensi. Teori agensi dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Dimana pemerintah sebagai agen, dan masyarakat sebagai principal. Derajat desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan argumentasi alokasi anggaran untuk barang publik lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena keunggulan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah yang mampu mencapai tingkat desentralisasi fiskal yang sangat baik dalam 3 periode dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal, serta dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung dapat meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Penelitian ini menyajikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015 dengan hasil rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Surabaya Tahun 2012-2015 secara rata-rata berada pada kategori Sangat baik (Karlina & Handayani, 2017). Sedangkan hasil penelitian milik peneliti menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 secara rata-rata 3 periode berada pada kategori sangat baik.
4. Tingkat rasio keserasian belanja daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 rata-rata mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya masih dalam kategori cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam belanja modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan pembangunan daerah. Pada penelitian ini, hasil rasio belanja daerah juga dapat dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi pada penelitian ini menunjukkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD harus dikelola dengan baik dan sumber anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah ditentukan oleh pencapaian tujuan daerah yang telah ditetapkan.

Masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berhak untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan tepat, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap belanja atau biaya-biaya yang menjadi dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian milik Amal dan Wibowo yang berjudul "analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi covid-19" yang menunjukkan bahwa hasil rasio belanja daerah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata 4 tahun berada pada batas wajar (Amal & Wibowo, 2022). Berbedad dengan hasil penelitian milik Marliani yang berjudul "analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten bandung tahun 2016-2020" yang menunjukkan hasil rasio belanja daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori cukup tinggi (Marliani, 2022). Hasil penelitian milik peneliti menunjukkan rasio belanja daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2020-2022 secara rata-rata 3 periode juga berada pada kategori batas wajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan indikator keuangan yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah secara rata-rata dalam 3 periode tergolong tidak efektif. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata dalam 3 periode tergolong dalam pola hubungan delegatif yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya sangat mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dinilai sangat baik yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio keserasian belanja daerah rata-rata rasio belanja operasi dan rasio belanja modal selamat tiga periode berada dalam batas wajar.

Dalam penelitian ini, hasil rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti pertumbuhan ekonomi daerah serta pendapatan asli daerah.

Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, ketika pendapatan meningkat, masyarakat akan menjadi lebih bersedia membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya PAD di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya. Rata-rata pada tiga periode menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya berada pada kategori delegatif atau telah mampu membiayai daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan keuangan untuk pemenuhan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Peneliti selanjutnya perlu memperpanjang periode pengamatan survei dan menganalisis situasi keuangan pemerintah daerah lebih rinci. Peneliti selanjutnya sebaiknya memanfaatakn teknik pengumpulan data tambahan seperti melakukan wawancara untuk mengungkap penyebab kenaikan dan penurunan keuangan daerah tersebut.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya selama (3) tiga tahun terakhir dan belum menggunakan metode wawancara atau survei untuk

mengetahui kendala dalam mencapai kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan beberapa metode uji data pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, *3*(2), 21–25. https://doi.org/10.35906/jm001.v3i2.304

Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1), 83–93. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723

Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(1), 11–15. https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63

Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. . (2014). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Karlina, A., & Handayani. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *6*(3), 911–912. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/988

Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, *16*(1), 1–14. https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.

Mahsun. (2013). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajagrafindo Persada.

Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, *14*(1), 11–20. https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84

Muarif, M. I. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *4*(4), 618–634.

Nuzulul Siswo Abdulaziz. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, *1*(2), 646–659. https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.142

Priono, H. (2003). Pengaruh Manfaat Komputerisasi dan Faktor Demografi End-User Computing terhadap Penyediaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Pelayaran di Wilayah Surabaya. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *13*(1), 104–116.

Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). Role of financial management in the improvement of local government performance. *Humanities and Social Sciences Reviews*, *7*(1), 77–86. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7110

Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional and Call for Paper STIE AAS*, 408–425.

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Administrasi Publik*, *Vol.2*(No.2), 236–242.

Widodo. (2001). *Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN.